

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KABUPATEN BIREUEN DALAM
MITIGASI BENCANA BANJIR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FAZLUL AUWAL

NIM. 200802007

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2024 M / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fazlul Auwal
NIM : 200802007
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 21 September 2002
Alamat : Desa Lancok Ulim, Kec. Pandrah, Kab. Bireuen

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya:

AR - RANIRY

Banda Aceh, 8 Agustus 2024

Yang Menyatakan




FAZLUL AUWAL
NIM. 200802007

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KABUPATEN BIREUEN DALAM
MITIGASI BENCANA BANJIR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**


**Oleh :
FAZLUL AUWAL
NIM. 200802007**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

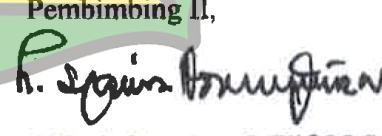
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


Siti Nur Zalikha. M.Si.
NIP. 199002282018032001

Pembimbing II,


Hijrah Saputra. S.Fil. M.Sos.
NIP. 199007212020121016

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KABUPATEN BIREUEN DALAM
MITIGASI BENCANA BANJIR**

SKRIPSI

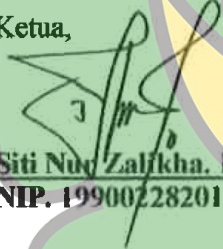
FAZLUL AUWAL
NIM. 200802007

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

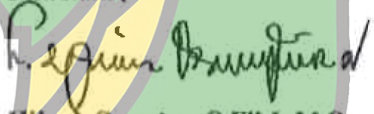
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
10 Safar 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Siti Nur Zulfkha, M.Si.
NIP. 199007282018032001


Sekretaris,


Hijrah Saputra, S.Fil.I, M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Penguji I,


Muazzinah, M.P.A
NIP. 198401012015031003

Penguji II,


Putri Marzanar, M.P.A
NIP. 199811022024032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh. Kabupaten Bireuen yang terletak di Aceh, sering mengalami kejadian banjir. Penanggulangan bencana banjir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen wajib menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, pada Bab IV pasal 34 ayat 2. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata ruang bangunan, serta pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik dengan pendekatan konvensional maupun modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam upaya penanggulangan bencana banjir, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BPBD Kabupaten Bireuen dalam upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada penerapan teori mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Bireuen belum melaksanakan pembangunan infrastruktur secara efektif dan seragam dalam mitigasi struktural. Namun, BPBD telah melaksanakan sosialisasi tanggap bencana dalam mitigasi nonstruktural dengan cukup baik. Namun demikian, BPBD belum menetapkan kebijakan atau peraturan mengenai penataan ruang dan pengaturan pembangunan. Faktor yang menjadi penghambat BPBD Kabupaten Bireuen yaitu BPBD belum menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Anggaran yang terbatas, Sumber daya manusia (SDM) masih kurang, penebangan pohon liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : Peran BPBD, Banjir, Mitigasi, Kabupaten Bireuen

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis bisa menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul “PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BIREUEN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR”. Doa serta salam dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beliau menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini adalah hasil penelitian dan syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh nilai mata kuliah skripsi pada program Strata-1 di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih .

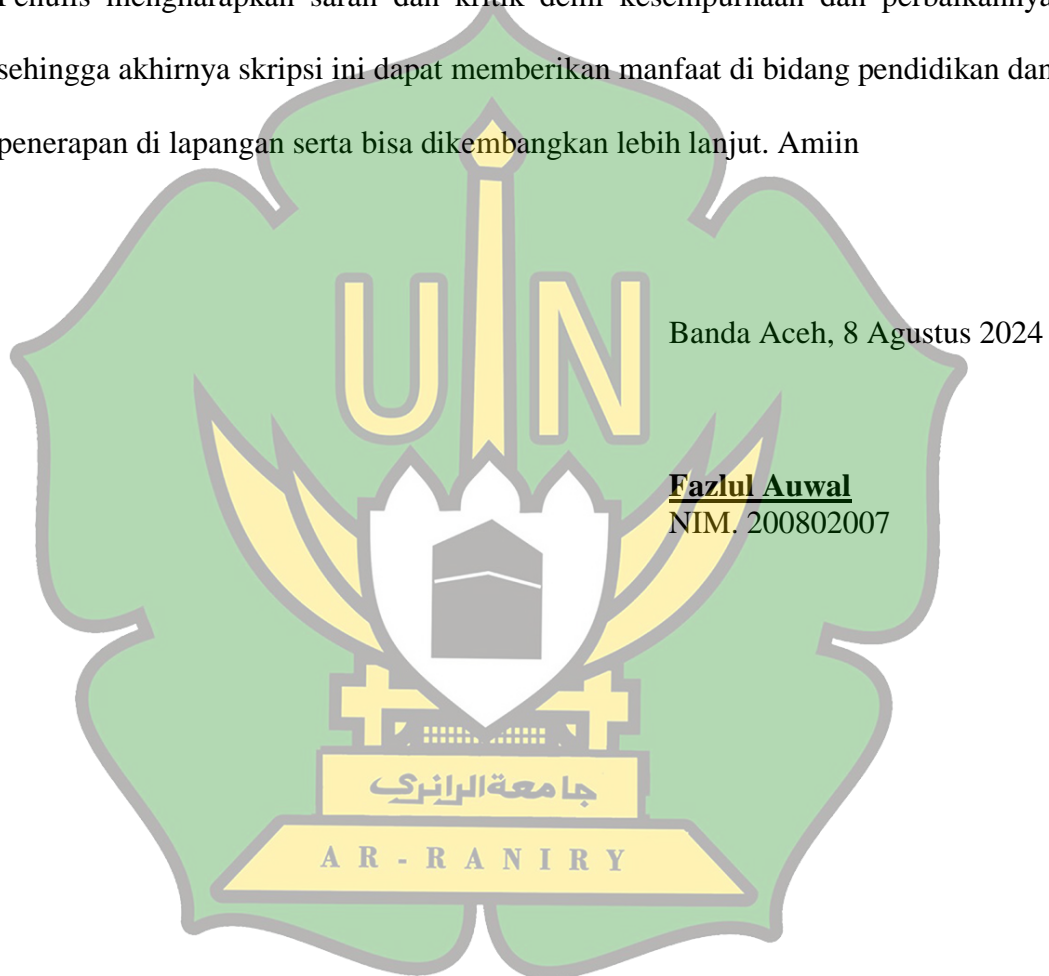
1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Eka Januar. M.Soc.Sc., Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

5. Siti Nur Zalikha, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta dukungan selama penyelesaian skripsi.
6. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan serta saran selama proses bimbingan berlangsung.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmunya dan dukungan kepada penulis.
8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penulisan terkait proses mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bireuen.
9. Kepada sahabat dan teman-teman peneliti Mujiburrahman, M.Luthfi Haidi, Rahmaddil, Lamkaruna, Reza Muhammad, Alfarazie, Gazy Al Ghifari, Aziz Alfianza, Muhibbussabri, Sariyana dan Arbianti yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti agar bisa menyelesaikan skripsi.
10. Terakhir, terima kasih kepada hobi saya yaitu sepak bola, yang telah selalu menghibur saya dalam keadaan apapun dan dari sepak bola saya belajar atas namanya kerja keras, semangat tinggi, jangan pernah menyerah dan jangan takut gagal.

Selain itu penulis ingin mengungkapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Jailani A.Jalil dan Ibunda Dra.Nurfadhliyah serta nenek dari penulis Almh. Rukiah Abdul Karim dengan segala pengorbanannya tidak akan pernah penulis lupakan jasa-jasa mereka.

Sekaligus senantiasa memberikan doa dan kasih sayang kepada penulis hingga sampai pada titik ini.

Kami menyadari penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut. Amiin



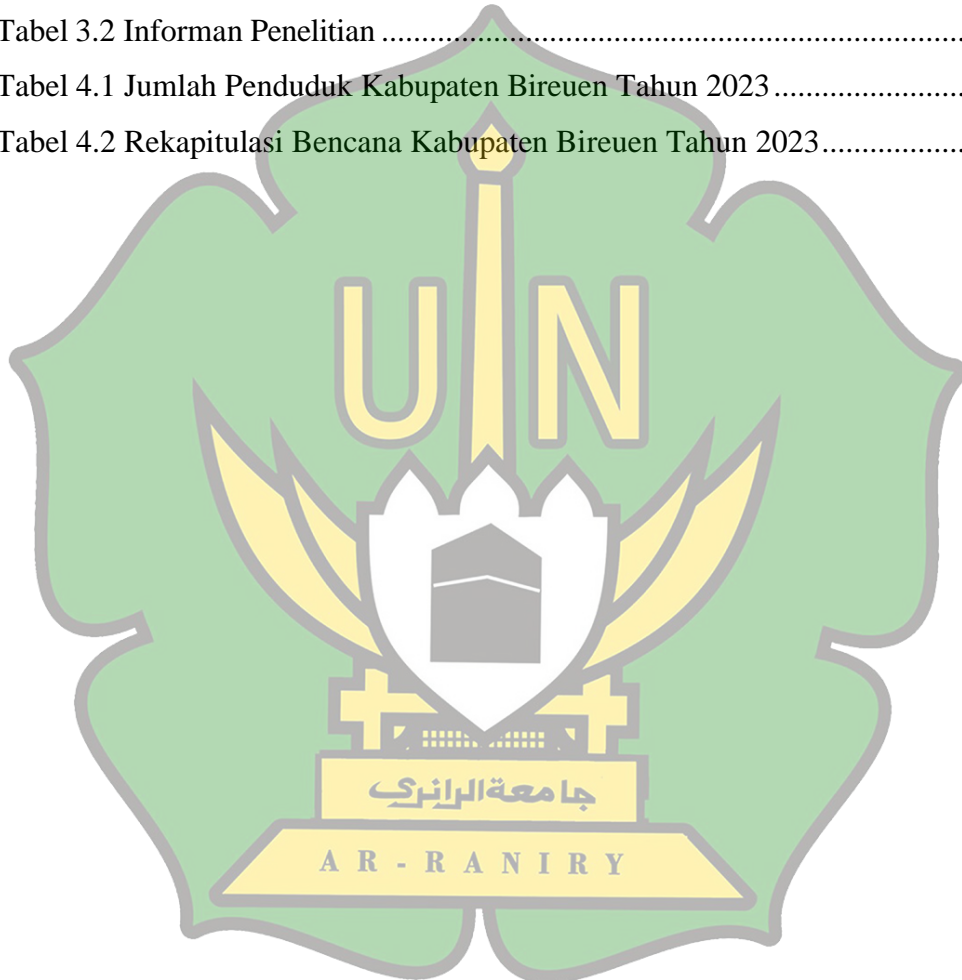
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori.....	14
2.2.1 Teori Peran	14
2.2.2 Konsep Mitigasi Bencana	17
2.2.3 Konsep Banjir	23
2.2.4 Jenis-Jenis Banjir	25
2.2.5 Faktor-Faktor Penyebab Banjir.....	26
2.3. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29

3.1. Pendekatan Penelitian	29
3.2. Fokus Penelitian	29
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.4. Sumber Data.....	31
3.5. Informan Penelitian.....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7. Teknik Analisis Data.....	33
3.8. Teknik Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Gambaran Umum Kabupaten bireuen.....	37
4.1.1 Fenomena Banjir di kabupaten bireuen.....	40
4.2. Profil BPBD Kabupaten Bireuen	43
4.2.1 Tupoksi BPBD Kabupaten Bireuen	43
4.2.2 Visi Misi BPBD Kabupaten Bireuen	46
4.2.3 Struktur Organisasi Kabupaten Bireuen.....	47
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
4.4. Peran BPBD Kabupaten Bireuen	47
4.4.1 Mitigasi Struktural.....	48
4.4.2 Mitigasi Non Struktural.....	55
4.5. Hambatan BPBD Kab.Bireuen dalam Mitigasi Bencana Banjir... 62	
4.5.1 Mitigasi Struktural	62
4.5.1 Mitigasi Non Struktural.....	63
BAB V PENUTUP	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Statistik Bencana di Indonesia dari Tahun 2020-2024	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	30
Tabel 3.2 Informan Penelitian	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2023	39
Tabel 4.2 Rekapitulasi Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2023	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	72
Lampiran 2 Surat Penelitian	73
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Potensi Bencana Bencana Banjir Kab.Bireuen.....	4
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bireuen	38
Gambar 4.2 Kondisi Banjir di Kabupaten Bireuen	41
Gambar 4.3 Pintu Pengendali Air	49
Gambar 4.4 Tanggul Beronjong.....	51
Gambar 4.5 Pembersihan Saluran-Saluran Irigasi	51
Gambar 4.6 Tanggul Saluran Sungai	53
Gambar 4.7 Sosialisasi dan (KIE) Daerah Rawan Bencana	56
Gambar 4.8 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bireuen	57
Gambar 4.9 Sosialisasi Mitigasi Bencana ke Wilayah	60



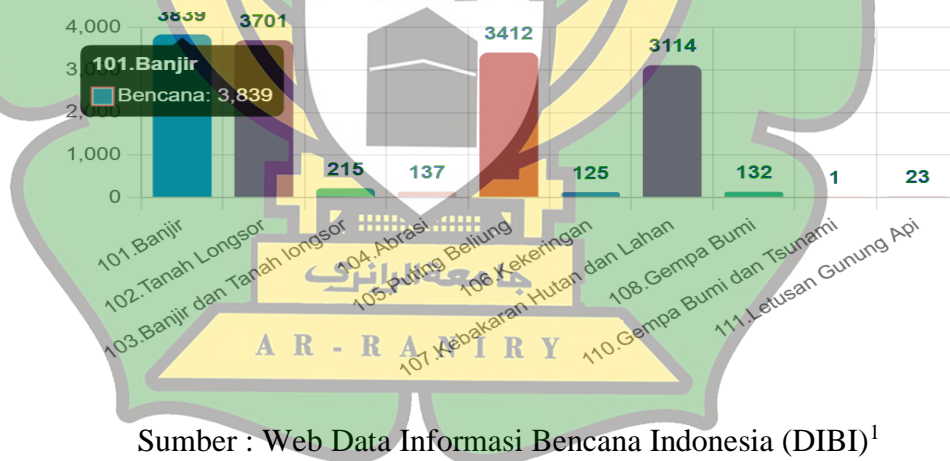
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Letak Indonesia di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropisnya panas dan iklim tropisnya hujan yang ditandai oleh variasi cuaca, suhu, dan pola angin. Atribut-atribut ini berpotensi menimbulkan bencana meteorologi seperti siklon, badai tropis, kekeringan, dan banjir yang muncul akibat perubahan iklim atau cuaca.

Tabel 1.1
Statistik Bencana di Indonesia dari Tahun 2020-2024



Sumber : Web Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)¹

Data Statistik Bencana Tahun 2020-2024 yang disusun oleh BNPB menunjukkan bahwa bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dan menempati urutan pertama dalam 4 tahun terakhir di Indonesia dengan total 3,839 peristiwa. Bencana banjir terjadi ketika daratan terbenam oleh air atau ketika

¹ Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Statistik Bencana di Indonesia, Di akses di <https://dibi.bnpb.go.id/>

wilayah tergenang oleh air dalam jumlah besar. Banjir sering terjadi akibat hujan deras yang berkepanjangan pada musim hujan, sehingga dampaknya dapat menimbulkan kerugian harta benda, rusaknya lingkungan, prasarana, pekerjaan umum bahkan korban jiwa.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mencegah berbagai potensi bencana alam melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BNPB bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi bencana. Mitigasi bencana mengacu pada serangkaian langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana. Langkah-langkah ini melibatkan pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana.² Sasarannya antara lain perencanaan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara menangani bencana.

Provinsi Aceh rawan terhadap bencana dikarenakan karakteristik geologi dan geografis Aceh yang terletak di jalur cincin api, menyebabkan beberapa gunung api, dan zona subduksi menjadi pusat gempa bumi dan tsunami. Aceh rawan terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk banjir bandang, tanah longsor, banjir,

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat 9

dan kekeringan.³ Pemerintah Aceh sendiri telah mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang sejak 22 Juni 2010 dan telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.

BPBA telah mencatat sebanyak 418 bencana terjadi di Aceh sepanjang tahun 2023, Jumlah bencana di Aceh tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022 yang terjadi sebanyak 469 kejadian. Kejadian bencana berupa kebakaran permukiman 149 kali, banjir 105 kali, Kebakaran Hutan dan Lahan 85 kali, Angin Puting Beliung 44 kali, Longsor 27 kali, Banjir Bandang 3 kali, hingga Abrasi 2 kali.⁴ Berdasarkan data di atas banjir menjadi salah satu ancaman serius bagi masyarakat. Pada dataran rendah, curah hujan yang tinggi sungai yang dangkal dan tidak ada tanggul untuk menahan debit air, akan langsung berdampak pada genangan banjir yang lebih besar. Perubahan iklim menyebabkan banjir menjadi lebih parah dan kerusakan hutan semakin tinggi, yang menurunkan kapasitas hutan untuk menampung air hujan menjadi rendah.⁵

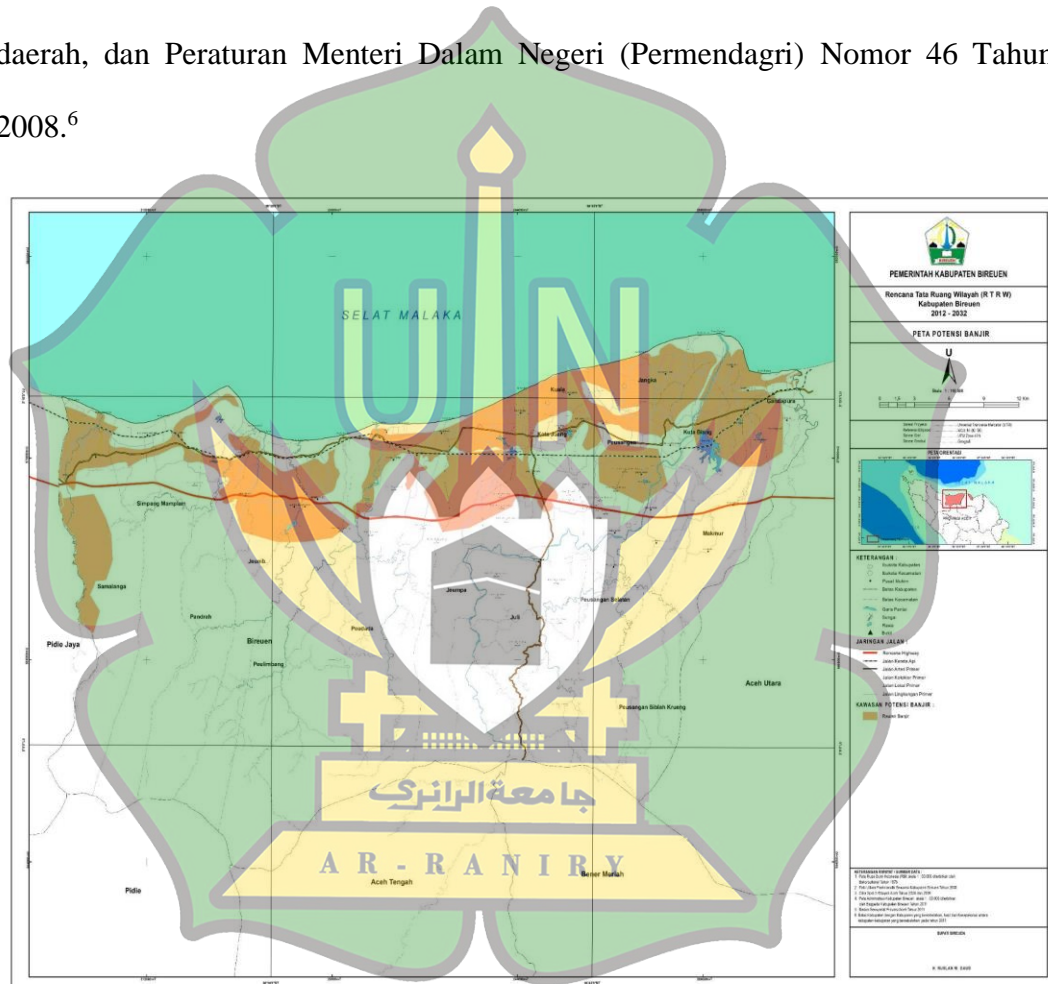
Provinsi Aceh terdiri dari total 23 kabupaten dan kota. Setiap Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana sesuai dengan Bab III Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oleh karena itu, Salah satu

³ Dinas Sosial Aceh, Aceh Rawan Bencana, Tagana Diharapkan Terampil Mengurangi Risiko Bencana di akses di <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/aceh-rawan-bencana-tagana-diharapkan-terampil-mengurangi-risiko-bencana> pada tanggal 12 Maret 2020

⁴ Haslinda Juwita, Tahun 2023 Aceh Dilanda 418 Bencana dengan Kerugian Rp 430 Miliar di akses di <https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/tahun-2023-aceh-dilanda-418-bencana-dengan-kerugian-rp-430-miliar> (diakses pada tanggal 02 Januari 2024)

⁵ Safrina, Di 2022, Sebanyak 469 Peristiwa Bencana Terjadi di Aceh di akses di <https://acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/di-2022-sebanyak-469-peristiwa-bencana-terjadi-di-aceh> (di akses pada tanggal 14 Februari 2023)

bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun yaitu bencana banjir. Maka Kabupaten Bireuen membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 3 Tahun 2008 yang memberikan pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008.⁶



Gambar 1.1 Peta Potensi Bencana Banjir Kabupaten Bireuen
 Sumber : Web Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bireuen⁷

Gambar diatas bisa dilihat hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen memiliki potensi bencana banjir. Beberapa penyebab banjir termasuk kerusakan

⁶ <https://bpbd.bireuenkab.go.id/halaman/latar-belakang>

⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bireuen, Peta Potensi Bencana Banjir Kabupaten Bireuen, <http://bappeda.bireuenkab.go.id/Bappeda>

hutan, rusaknya tanggul, dan curah hujan yang tinggi dan dangkalnya sungai membuat meluapnya air masuk ke pemukiman masyarakat. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bireuen berdampak buruk pada lingkungan. Banjir dapat merusak sarana dan prasarana, kendaraan, rumah, jembatan, berbagai fasilitas umum dan meluapnya hingga jalan raya dapat menimbulkan lumpuhnya transportasi.

Kabupaten Bireuen berpotensi mengalami banjir ringan atau ringan karena topografinya yang bervariasi, hanya sebagian kecil wilayah pesisir yang rawan banjir. Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan dan 609 permukiman. Pada bulan November 2023, banjir melanda empat desa di Kecamatan Makmur, yaitu Desa Ulee Gle, Desa Cet Krut, Desa Blang Kuthang, dan Desa Leubu Me. Banjir di Kabupaten Bireuen tersebut diakibatkan oleh hujan deras yang terus menerus sehingga mengakibatkan meluapnya Sungai Leubu.⁸

Hujan deras pada Kamis (25/1) mengakibatkan banjir di Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peulimbang, dan Kecamatan Pandrah. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BNPB, banjir setinggi 30-100 cm merendam 3.458 rumah dan 32 hektare areal persawahan. Selain itu, banjir juga berdampak pada 3.458 kepala keluarga atau 13.832 jiwa. Selain itu, 1.199 jiwa terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Banjir juga mengakibatkan satu rumah kayu dan satu mobil pikap rusak berat, namun tidak menimbulkan korban jiwa.⁹

⁸ Deshinta Ariesta, 4 Gampong Terendam Banjir di Kabupaten Bireuen, di akses di <https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/4-gampong-terendam-banjir-di-kabupaten-bireuen> (diakses pada tanggal 30 November 2023)

⁹ Rusnadi Suyatman Putra, Banjir di Kabupaten Bireun, Sebanyak 3.458 Rumah Terendam dan 1.199 Jiwa Mengungsi, di akses di <https://www.bnpb.go.id/berita/banjir-di-kabupaten-bireun->

Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen memerlukan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada Bab IV pasal 34 ayat 2. Kegiatan tersebut meliputi penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, penataan bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik yang konvensional maupun modern.

Pada penanggulangan bencana yang ada saat ini cenderung mengabaikan pentingnya kegiatan mitigasi yang bertujuan untuk meminimalisir risiko bencana sebelum terjadi bencana. Sebaliknya, selama ini penanggulangan bencana lebih banyak difokuskan pada upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses mitigasi bencana adalah belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah bagi warga di wilayah rawan banjir, seperti belum adanya perbaikan tanggul yang rusak, serta belum optimalnya penyuluhan mitigasi bencana bagi warga di wilayah rawan banjir. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BIREUEN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bencana banjir rutin terjadi di Kabupaten Bireuen setiap tahunnya.
2. BPBD Kabupaten Bireuen belum optimal dalam mitigasi bencana banjir.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPBD Kabupaten Bireuen dalam melakukan Mitigasi bencana banjir?
2. Apa hambatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam Mitigasi bencana banjir?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana banjir.
2. untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPBD Kabupaten Bireuen dalam upaya mitigasi bencana banjir.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagi semua pihak terkait. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Bagi Mahasiswa

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai keterlibatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam mitigasi bencana banjir.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi penelitian selanjutnya, sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a) Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang keterlibatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam kegiatan mitigasi bencana banjir.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menentukan peran BPBD Kabupaten Bireuen dalam mitigasi bencana banjir.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan memberikan tambahan wawasan tentang peran BPBD Kabupaten Bireuen dalam mitigasi bencana banjir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Wanda Syahputra, 2022	Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat	Penelitian ini memaparkan kontribusi BPBD Kota Singkawang dalam menanggulangi bencana banjir dengan meningkatkan kemampuan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masyarakat melalui program Keluarga Tangguh Bencana (KELTANA), serta melakukan upaya pengurangan dampak bencana seperti membuat peta rawan banjir dan melakukan pendataan risiko bencana. ¹⁰

¹⁰ Wanda Syahputra, 2022, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat". Tesis Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Kalimantan Barat.

<p>Heny Suhindarno, 2022</p>	<p>Strategi BPBD Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>Penelitian ini mengkaji metode mitigasi banjir yang dilakukan BPBD Kabupaten Bojonegoro, dengan fokus pada tindakan spesifik yang dilakukan pada fase prabanjir, banjir, dan pascabanjir. BPBD Kabupaten Bojonegoro melakukan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) sebanyak tiga kali dalam setahun, Saat terjadi banjir, BPBD membentuk tim komando tanggap darurat yang terdiri dari petugas evakuasi, dapur umum, bantuan medis, keamanan. Setelah banjir, BPBD melakukan kajian dan penilaian dampak bencana.¹¹</p>
<p>Pujianti dan Gerry Katon Mahendra, 2023</p>	<p>Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana</p>

¹¹ Heny Suhindarno, “Strategi Bpbd Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro”, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Volume 5 No 2, (Agustus 2021)

		(BPBD) Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana banjir. Peneliti berfokus pada meningkatnya frekuensi banjir di Kota Yogyakarta. ¹²
Noviana Dacosta, 2022	Hoar	Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala BPBD Kabupaten Malaka menerapkan konsep penanggulangan bencana yang efisien. Peran BPBD meliputi tindakan prabencana, yaitu pemerintah daerah merumuskan kebijakan dan memberikan layanan jika terjadi bencana. Saat terjadi bencana, BPBD membangun memperkuat tebing. Pascabencana, BPBD melakukan upaya rehabilitasi

¹² Pujianti, Gerry Katon Mahendra, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta", Jurnal Politik dan Governance, Vol.5 No.2, (Desember 2023)

		dan rekonstruksi di wilayah terdampak. ¹³
Nurul Sahira, 2023	Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Utara	Penelitian ini mengkaji tentang keterlibatan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Aceh Utara dengan tiga indikator utama. Indikator pertama adalah penyelenggaraan pelatihan terkait kebencanaan bagi masyarakat pada tahap prabencana. Tahap kedua adalah tahap tanggap darurat, yang meliputi berbagai tindakan pengendalian banjir, mulai dari antisipasi hingga evakuasi wilayah terdampak. Tahap ketiga adalah tahap pascabencana, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir. ¹⁴

¹³ Noviana Hoar Dacosta, 2022, “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”, Skripsi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Nusa Cendana Kupang

¹⁴ Nurul Sahira, 2023, “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Utara”, Skripsi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas peran Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir dan sama-sama menerapkan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran terkait suatu masalah yang terjadi. Sedangkan Perbedaan penelitian ini lebih fokus tentang penanggulangan bencana banjir secara umum (Pra Bencana, Saat Bencana, Pasca Bencana), sedangkan skripsi peneliti adalah lebih berfokus pada pra bencana yaitu tahap mitigasi bencana banjir, selain itu skripsi peneliti ini berlokasi di Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dan berbeda lokasi dengan penelitian-penelitian di atas.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Peran

Peran ialah sekumpulan perilaku yang diharapkan oleh orang yang memegang posisi tertentu dalam masyarakat.¹⁵ Peran mengacu pada fungsi atau tanggung jawab tertentu yang dilakukan oleh seorang individu, lembaga, atau organisasi. Peran dapat didefinisikan sebagai serangkaian tugas yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi atau kedudukan sosial tertentu dalam suatu organisasi. Setiap lembaga atau organisasi biasanya memiliki tugas khusus yang harus dipenuhi, yang ditetapkan oleh fungsi lembaga tersebut. Ada dua kategori peran yang berbeda, peran diharapkan dan peran dilakukan. Dalam

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

melaksanakan peran tersebut, terdapat faktor mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya.¹⁶

Dalam konteks manajemen, peran merujuk pada ekspektasi terkait perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh individu yang memegang posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Ini terutama mencakup fungsi dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu tersebut, sehingga keberadaan organisasi atau lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Ketika seorang individu menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan statusnya, mereka dianggap sedang menjalankan peranan dalam organisasi tersebut.¹⁷

Peran dapat diartikan sebagai sekumpulan tindakan atau sifat yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan sosialnya. Sementara itu, istilah peranan ialah tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu lingkungan tertentu. Soerjono Soekanto mengartikan peran sebagai unsur dinamis dari kedudukan atau status sosial seseorang. Apabila seseorang memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan sosialnya, maka ia telah menjalankan peranan secara tersebut.¹⁸

Menurut Koentjaraningrat, peran didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan jabatan tertentu. Konsep peran berfokus pada pola

¹⁶ Andri Purwa Nugraha, Herdian Kertayasa, "Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta" Tahun 2022, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No.1, Januari 2022

¹⁷ Irfan Laabu, Skripsi: "Peran pemerintah Daerah Dalam memasarkan pariwisata bahari Di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah". (Univmuh Makassar,2017) Hal. 10

¹⁸Ibid. Hal. 9

perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu organisasi atau sistem.¹⁹

Menurut Biddle, peran dibagi menjadi empat kategori:²⁰

- 
- a. Peran Fungsional adalah peran ini berfokus pada perilaku individu yang memegang posisi tinggi dalam sistem sosial yang stabil, menekankan pada fungsi dan tanggung jawab mereka dalam sistem tersebut.
- b. Peran interaksional mengacu pada fungsi atau posisi spesifik yang dimainkan oleh seorang individu dalam interaksi sosial atau lingkungan kelompok. Posisi ini berpusat pada studi perilaku dan fungsi individu dalam hubungan sosial, yang menekankan peran individu dalam interaksi ini.
- c. Peran struktural mengacu pada peran yang selaras dengan struktur atau posisi sosial tertentu, dan ditunjukkan oleh perilaku individu dalam masyarakat.
- d. Peran organisasional adalah ini menekankan hubungan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhubung dengan interaksi sosial dan fokus khusus pada perencanaan.

¹⁹Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani, "Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)" Tahun 2022, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No.1, Januari 2022

²⁰ Soekanto Soerjono, 2013. Sosial suatu pengantar, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Hal.212

Menurut Biddle dan Thomas, istilah dalam teori peran dikelompokkan ke dalam empat kategori sebagai berikut:²¹

- a. orang yang terlibat dalam interaksi sosial
- b. Perilaku atau tindakan yang terjadi selama interaksi
- c. Status atau kedudukan individu dalam perilaku
- d. Hubungan antara individu dan perilaku

Peran diciptakan untuk memastikan tingkat keterlibatan seseorang, sifat kontribusinya, dan kerangka organisasi kerja serta tujuannya. Ini mencakup faktor-faktor seperti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan bentuk kontribusi lainnya, seperti ide, tenaga kerja, bahan, dan sebagainya. Selain itu, organisasi kerja mencakup pembagian peran dalam menetapkan tujuan, yang biasanya dilakukan secara kolaboratif dengan pihak-pihak lain dalam kelompok.

Bahwa peran merujuk pada sikap atau tindakan yang diinginkan oleh orang banyak atau kelompok terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

2.2.2 Konsep Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana bertujuan mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap bencana dan mengubah perilaku individu atau masyarakat yang berisiko terkena dampaknya. Langkah utama untuk mengurangi ancaman bencana sering kali melibatkan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, sementara mitigasi

²¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 215

terhadap perilaku individu yang kena bencana biasanya ditangani melalui relokasi atau pemindahan dari wilayah berisiko tinggi.²²

King mendefinisikan mitigasi sebagai proses mengambil tindakan sebelum terjadinya bencana untuk meminimalkan atau menghilangkan dampak bencana terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan Copollo berpendapat bahwa mitigasi adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana dengan mengurangi kemungkinan terjadinya serta mengurangi dampak-dampak yang mungkin timbul dari risiko tersebut.²³

Manajemen bencana harus dimulai dengan fase prabencana, yang sering disebut sebagai mitigasi bencana, di suatu wilayah dengan potensi bencana yang tinggi. Mitigasi bencana mencakup berbagai langkah yang dirancang untuk meminimalkan kemungkinan dan tingkat keparahan bencana. Hal ini dicapai melalui dua metode mitigasi yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural mencakup inisiatif pembangunan fisik yang dilaksanakan untuk mengurangi risiko. Mitigasi non-struktural adalah metode yang berupaya mengurangi kemungkinan atau dampak bencana dengan mengubah perilaku manusia atau proses alami, tanpa memerlukan penggunaan struktur yang dirancang. dan penerapan kebijakan dan peraturan yang memfasilitasi pengurangan risiko bencana tanpa memerlukan pembangunan fisik.²⁴

²² Nurjanah, dkk., Manajemen Bencana , (Bandung : Alafabeta, 2011), hal. 40

²³ Bevaola, Kumusari, 2014, Manajemen Bencana dan Kapasitas Pemerintah Lokal, (Yogyakarta : Gaya Media), hal.22

²⁴ Bevaola, Kumusari, 2014, Manajemen Bencana dan Kapasitas Pemerintah Lokal, (Yogyakarta : Gaya Media), hal. 23

1) Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural ialah tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak bencana dengan membangun fasilitas atau infrastruktur fisik dan teknis. Hal ini sangat penting dalam konteks mitigasi struktural. Tujuan mitigasi struktural adalah untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan menggunakan rekayasa teknis dalam pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, sehingga mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode mitigasi struktural meliputi:²⁵

- a) Membangun tanggul Sungai
- b) Membangun bendungan
- c) Membangun pintu-pintu pengendali air
- d) Pengerukan Sungai

2) Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non struktural ialah tindakan yang diambil untuk mengecilkan dampak bencana tanpa melakukan perubahan fisik atau struktural. Bisa dalam lingkup kegiatan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, seperti penyusunan peraturan dan undang-undang terkait penanggulangan bencana. Contoh langkah-langkah mitigasi non struktural meliputi:²⁶

²⁵ Shirley Savetlana, dkk., Ilmu-Ilmu Teknik : Kebencanaan 2019, (Lampung : UPT Perpustakaan Universitas Lampung), hal 15-16

²⁶ Ibid

- a) Membuat peraturan-peraturan
- b) Melakukan Pelatihan dan Penyuluhan
- c) Mengevaluasi Tempat Rawan Bencana
- d) Membuat peta bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang berpotensi membahayakan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Bencana ini dapat terjadi karena faktor alam, non-alam, atau faktor manusia. Sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian material, hingga korban jiwa. Bencana disebabkan oleh interaksi tiga faktor utama: risiko bencana, kerentanan, dan kapasitas, yang semuanya dipicu oleh suatu kejadian tertentu.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengidentifikasi tiga kategori bencana yang berbeda:²⁷

- 1) Bencana alam adalah kejadian yang diakibatkan oleh berbagai proses alam yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ancaman. Contoh bencana alam meliputi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan banjir, badai, kekeringan dan tanah longsor. Bencana-bencana ini berasal dari proses atau aktivitas alam yang terjadi di Bumi.
- 2) Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak berasal dari kejadian alam. Contoh bencana

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

non alam meliputi kegagalan fungsi teknologi, masalah yang berasal dari proses modernisasi, dan wabah penyakit.

- 3) Bencana sosial adalah kategori bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh tindakan manusia. Bencana ini mencakup berbagai skenario, termasuk konflik antara kelompok sosial atau masyarakat, serta tindakan terorisme.

Bencana memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan perubahan gaya hidup, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, dan meningkatnya kebutuhan pribadi atau masyarakat.

Mitigasi bencana berupaya mengurangi kemungkinan resiko dan dampak yang timbul akibat bencana terhadap masyarakat di daerah yang rentan. Ini mencakup bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh tindakan manusia, atau gabungan keduanya, baik dalam konteks suatu negara atau Masyarakat.²⁸

Mitigasi bencana yang efektif perlu mencakup tiga elemen utama, yaitu:²⁹

- 1) Penilaian Bahaya (Hazard Assessment) merupakan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi orang dan aset yang mungkin berada dalam bahaya dan mengevaluasi tingkat risiko. Untuk melaksanakan prosedur ini membutuhkan pengetahuan tentang sumber bencana, kemungkinan terjadinya bencana, dan data tentang bencana sebelumnya. Hasil dari fase

²⁸ Nandy, "Materi Mitigasi Bencana: Pengertian, Jenis, Strategi, Tahapan dan Contohnya", diakses dari <https://www.gamedia.com/literasi/mitigasi-bencana/>

²⁹ Ensiklopedia Penanggulangan Bencana Indonesia, Mitigasi Bencana yang Efektif, diakses dari https://bencanapedia.id/Mitigasi_Bencana (Di akses pada tanggal 28 September 2017)

ini adalah peta potensi bencana, yang sangat diperlukan dalam merumuskan Langkah-langkah mitigasi berikutnya.

- 2) Peringatan (Warning) adalah pemberitahuan pada publik tentang potensi terjadinya bencana, seperti tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi atau aliran lava yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Sistem peringatan ini bergantung pada data riwayat bencana masa lalu sebagai indikator pertama dan memanfaatkan berbagai metode komunikasi untuk mengirimkan peringatan kepada pihak berwenang atau masyarakat umum. Pengiriman peringatan bencana mesti disampaikan tepat waktu, akurat, serta dapat dipercaya
- 3) Persiapan (Preparedness) Tindakan kesiapan bergantung pada upaya mitigasi sebelumnya dan memerlukan pemahaman tentang sistem peringatan untuk memastikan waktu untuk melakukan penilaian dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk kembali setelah situasi dianggap aman. Kepedulian yang ditunjukkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting saat ini dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Kesiapsiagaan juga mencakup perencanaan tata ruang, yaitu penempatan strategis fasilitas umum dan sosial di daerah yang rentan terhadap bencana sebagai sarana mitigasi non struktural. Sedangkan Mitigasi struktural adalah penerapan langkah-langkah untuk membangun bangunan yang tahan terhadap bencana dan untuk melindungi struktur bangunan terhadap bencana

Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Tindakan mitigasi bencana meliputi:

- 1) Proses mengidentifikasi dan memantau potensi resiko bencana untuk memahami potensi ancaman.
- 2) Pelaksanaan tindakan secara fisik maupun non-fisik serta pengaturan dalam penanggulangan bencana.
- 3) Identifikasi dan pemahaman tentang asal ancaman bencana
- 4) Pengawasan pengelolaan sumber daya alam untuk mencegah risiko bencana.
- 5) Pengawasan tentang pengaturan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka memperkecil resiko bencana.

Mitigasi bencana merupakan komponen penting dari penanggulangan bencana, karena melibatkan langkah-langkah awal yang dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk menghindari atau mengurangi dampaknya bencana, dengan tujuan untuk menurunkan kerugian material dan korban jiwa.

2.2.3 Konsep Banjir

Banjir terjadi akibat curah hujan yang berlebihan, yang mengakibatkan terkumpulnya atau tergenangnya air sungai. Banjir terjadi ketika air sungai melebihi kapasitas normalnya, sering kali banjir disebabkan oleh curah hujan yang

berlebihan. Selain itu, banjir juga dapat terjadi akibat gelombang pasang yang merendam sebagian besar area dataran banjir.³⁰

Banjir dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu area mengalami genangan air yang berlebihan karena luapan air dan melebihi kapasitas saluran-saluran setempat. Kejadian ini sering kali menimbulkan dampak negatif, termasuk kerugian dalam bentuk fisik, serta gangguan sosial dan ekonomi di masyarakat.³¹

Banjir merupakan kejadian terjadi saat debit air sungai melebihi kapasitasnya, sehingga mengakibatkan luapan air di tepi sungai dan menggenangi wilayah di sekitarnya.³²

Banjir merupakan bencana yang terjadi secara berkala akibat luapan air yang melebihi kapasitas saluran drainase yang ada sehingga mengakibatkan terendamnya wilayah di sekitarnya. Banjir dapat terjadi karena faktor curah hujan yang deras, tanggul atau bendungan yang jebol, pergantian suhu, dan terhambatnya saluran air di lokasi lain. Banjir juga dapat terjadi akibat luapan air yang melebihi kapasitas saluran drainase atau debit sungai yang melebihi ambang batas maksimal.

³⁰ Sri Muliana Mardikaningsih dkk, "Studi Kerentanan Dan Arahan Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen" Tahun 2016, Jurnal GeoEco Vol. 3, No. 2 Juli 2017, Hal.157-163

³¹ Dewi Arum Pertiwi, "Geologi Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Daerah Bahaya Banjir Dengan Metode Ahp Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur" Tahun 2021, Jurnal Teknik Geologi: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol. 4 No. 1, hal. 7-17, Juli 2021

³² Lili somantri, "Pemanfaatan Teknik Penginderaan Jauh Untuk Mengidentifikasi Kerentanan Risiko Banjir", Tahun 2008, Jurnal gea, jurusan pendidikan geografi, Vol 8 No 2 (2008)

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) menggolongkan bencana banjir menjadi empat kategori berdasarkan sumber airnya:³³

1. Banjir terjadi ketika curah hujan yang sangat tinggi melebihi kapasitas sistem drainase air, baik sungai alami maupun sistem drainase buatan manusia.
2. Banjir sungai terjadi akibat naiknya muka air akibat dampak pasang surut air laut atau meningkatnya tinggi gelombang laut akibat badai.
3. Banjir terjadi akibat tidak berfungsinya atau struktur bangunan buatan seperti tanggul, bendungan, atau bangunan lain yang dirancang untuk mengendalikan banjir.
4. Banjir terjadi akibat runtuhnya bendungan alam atau tersumbat aliran sungai akibat tanah longsor. Jika bendungan alam sudah mencapai batasnya dan tidak mampu lagi menahan kekuatan air, maka bendungan tersebut akan jebol dan mengakibatkan aliran air yang deras berubah menjadi banjir bandang.

³³ Bakornas PB, 2007, Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia Edisi II.

2.2.4 Jenis-jenis Banjir

Adapun jenis-jenis banjir sebagai berikut:³⁴

a. Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan jenis banjir yang sangat berbahaya karena dapat mengangkut berbagai macam benda. Banjir bandang tidak hanya mengangkut air tetapi juga lumpur. Banjir bandang ini berpotensi mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Banjir bandang sering terjadi akibat proses penggundulan hutan dan sering terjadi di wilayah yang bermedan terjal. Banjir bandang sering mengakibatkan pengangkutan pohon dan bongkahan batu besar, yang dapat membahayakan permukiman manusia dan mengakibatkan kematian.

b. Banjir air

Banjir merupakan salah satu jenis banjir yang sering terjadi, yang sering terjadi akibat luapan air yang melebihi kapasitas sungai, danau, atau saluran air. Fenomena ini terjadi karena wadah penampungan tidak mampu menampung air dalam jumlah besar, sehingga air meluap ke wilayah di sekitarnya. Banjir sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan penumpukan air yang melampaui kapasitas maksimumnya dan akhirnya meluap.

³⁴ Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, 10 Februari 2016, Mengetahui Jenis Jenis Banjir Dan Cara Menanggulanginya, di akses dari <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/>

c. Banjir lumpur

Banjir lumpur merupakan fenomena geologi yang ditandai dengan menggenangi permukaan tanah akibat lepasnya air dan sedimen dari bawah permukaan bumi. Banjir lumpur berbeda dengan banjir bandang yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan. Lumpur yang keluar mengandung zat gas yang sangat berbahaya.

d. Banjir Rob (Banjir Laut air Pasang)

Banjir rob sering terjadi akibat naiknya permukaan air laut saat pasang. Kejadian ini sering mengakibatkan tergenangnya pemukiman di wilayah pesisir.

e. Banjir Cileunang

Banjir Cileunang memiliki kemiripan dengan banjir air pada umumnya, meskipun sumber utamanya adalah curah hujan yang sangat deras. Pada saat curah hujan tinggi, jumlah air yang mengalir bertambah cepat dan melebihi kapasitas saluran yang ada sehingga mengakibatkan luapan. Kejadian ini disebut sebagai banjir Cileunang.

2.2.5 Faktor-Faktor Penyebab Banjir

Banjir sering terjadi ketika curah hujan melebihi batas normal, sehingga melebihi kapasitas sistem drainase air alami dan buatan manusia, seperti sungai, saluran drainase, dan kanal banjir, untuk menangani air hujan yang terkumpul.

Akibatnya, air melebihi kapasitasnya dan menyebabkan genangan air. Penyebab banjir dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu:³⁵

1. Faktor penyebab banjir alami

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir alami, antara lain:

- a. Curah hujan
- b. Kondisi geografis
- c. Proses erosi dan pengendapan
- d. Kapasitas sungai
- e. Kapasitas drainase yang tidak memadai
- f. Pengaruh pasang surut

2. Faktor penyebab banjir akibat Tindakan manusia

Tindakan manusia juga dapat menyebabkan banjir, antara lain:

- a. Perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)
- b. Permukiman kotor dan penumpukan sampah
- c. Sistem Drainase Perkotaan dan perluasan pertanian
- d. Rusaknya infrastruktur pengendalian air
- e. Desain sistem pengendalian banjir yang tidak memadai
- f. Penggundulan hutan atau kerusakan hutan

³⁵ M. Chazienal Ulum, 2014, Manajemen Bencana Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif, (Malang : UB Press). Hal.56

Faktor-faktor penyebab banjir ini penting untuk dipertimbangkan dan dipahami dalam perencanaan mitigasi dan penanganan bencana banjir, agar tindakan yang diambil dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko dan dampak banjir.

2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang menjadikan data deskriptif termasuk perilaku dan kata-kata tercantum atau ucapan individu. Pendekatan ini difokuskan pada pemahaman latar dan individu secara menyeluruh.³⁶

Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan memahami suatu kejadian dengan memberikan gambaran yang mendalam mengenai kondisi objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara mendeskripsikan keadaan objek berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk lisan dan tertulis yang diperoleh melalui metode-metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Bireuen dalam mitigasi bencana banjir di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya banjir.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dalam

³⁶ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Makassar: syakir Media Press, 2001), hal. 30

penanggulangan bencana banjir. BPBD berperan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana banjir.

Tabel 3.1
Fokus Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Mitigasi Bencana	1.) Mitigasi Struktural 2.) Mitigasi Non Struktural	Shirley Savetlana, dkk., Ilmu-Ilmu Teknik : Kebencanaan 2019
2.	hambatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam Upaya mitigasi bencana banjir		

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah yang sering mengalami genangan dan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen terletak di Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran BPBD Kabupaten Bireuen dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut dan untuk mengetahui kendala yang menghambat mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bireuen. Dalam proses penelitian dimulai pada bulan Juli 2024.

3.4. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan berbagai pendekatan, seperti melakukan wawancara dengan beberapa informan, memeriksa dokumen, dan melihat langsung subjek penelitian. Data utama diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala desa dan Masyarakat terdampak banjir lainnya. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke tempat rawan banjir untuk mengumpulkan data yang lengkap terkait dengan permasalahan yang diteliti

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder mengacu pada materi yang peneliti peroleh dengan meninjau sumber atau dokumentasi yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber tersebut mencakup berbagai media seperti buku, skripsi, jurnal, dan internet

3.5. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan *purposive sampling* untuk mengidentifikasi informan penelitian. Teknik *purposive sampling* meliputi pemilihan informan untuk tujuan penelitian tidak didasarkan pada strata, posisi, pedoman, atau wilayah tertentu, melainkan berdasarkan tujuan dan pertimbangan yang relevan dengan masalah penelitian. Informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah Informan
1	Kepala BPBD Kabupaten Bireuen	1 Orang
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Orang
3	Kepala Desa	3 Orang
4	Masyarakat	3 Orang
	Jumlah	8 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu strategi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi di Kabupaten Bireuen yang sering terjadi banjir. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara visual dan memahami keadaan sebenarnya di lapangan serta memperoleh informasi yang akurat untuk proses pengumpulan data yang lebih tepat.

2. Wawancara

Pendekatan pengumpulan data yang dikenal dengan wawancara merupakan suatu bentuk tanya jawab terstruktur antara peneliti dengan informan yang telah dipilih secara khusus sebagai sumber informasi.

Salah satu tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung yang tidak dapat diperoleh melalui sumber data lainnya. Prosedur wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini difokuskan pada wawancara dengan narasumber kunci seperti Kepala Bidang Pelaksanaan dan Kepala Bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen, serta Kepala Desa dan masyarakat yang terkena dampak langsung bencana banjir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti pendukung yang memperkuat penelitian. Dokumentasi ini dapat mencakup beberapa bentuk, seperti gambar, rekaman audio, dan catatan hasil wawancara yang dibuat selama penelitian dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, penulis akan mengabungkan data dalam bentuk bahan tertulis dan foto yang berkaitan dengan prosedur mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penting dalam proses analisis data, saat data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan diolah secara sistematis. Proses ini meliputi penataan data secara sistematis, pemilihan informasi yang relevan dan penting, dan serta penentuan bagian-bagian yang perlu

diteliti lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah memberikan hasil yang jelas dan mudah dipahami.³⁷ Untuk melakukan analisis data kualitatif, terdapat Langkah yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses untuk meringkas, memilih elemen-elemen utama, dan fokus pada aspek-aspek yang penting dari data. Proses ini melibatkan pencarian tema dan pola dalam data tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diolah menghasilkan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data merujuk pada penyusunan ringkasan yang menggambarkan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dalam mengatasi bencana banjir.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penting yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis, sehingga dapat memperoleh Kesimpulan mengenai peran BPBD Kabupaten Bireuen dalam mitigasi bencana banjir.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Tahap ini melibatkan pemeriksaan hasil reduksi data dan merujuk pada rumusan

³⁷ Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta : PT. Gramedia, 2007). Hal. 333-345

masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini, data yang diperoleh akan dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan yang memberikan solusi atas kendala yang dihadapi.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi untuk menilai ketepatan informasi. triangulasi ini melibatkan penggabungan berbagai metode untuk mengumpulkan data serta berbagai sumber data yang sudah ada. Dengan demikian, peneliti melakukan perbandingan antara hasil wawancara, observasi, serta data lapangan dari informan yang relevan, dan informasi yang diperoleh dari dokumentasi penelitian lapangan saat ini

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber melibatkan verifikasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, , berkas, dan dokumen lain, untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan data dengan memperolehnya dari sumber yang sama melalui beberapa sumber. Misalnya, data yang dikumpulkan melalui proses observasi dapat diverifikasi dengan melakukan wawancara.

c. Triangulasi waktu

Waktu dapat memengaruhi keakuratan dan keabsahan data. Data dari wawancara yang masih baru-baru biasanya memberikan data yang lebih bermakna. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dapat diandalkan, perlu dilakukan validasi keandalan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada waktu serta situasi yang tidak sama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Aceh yang resmi menjadi daerah otonom pada tanggal 12 Oktober 1999, setelah dimekarkan dari Kabupaten Aceh Utara. Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada koordinat antara $04^{\circ} 54' 00''$ hingga $05^{\circ} 21' 00''$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 20' 00''$ hingga $97^{\circ} 21' 00''$ Bujur Timur. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1.796,32 km² atau setara dengan 179.632 hektar.

a. Batas-batas wilayah Kabupaten Bireuen yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara
2. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Kabupaten Bener Meriah.

Topografi Kabupaten Bireuen mencakup wilayah datar dan bergelombang yang meliputi sekitar 8% dari keseluruhan area, terutama di bagian pesisir utara. Sementara itu, di wilayah selatan, topografi lebih didominasi oleh perbukitan dengan tingkat kemiringan yang berkisar antara 15% hingga 30%.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen memiliki 17 kecamatan dan 609 gampong. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblih Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang.

Adapun Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkan Proyeksi Interim berjumlah 458.978 jiwa, terdiri dari 226.002 jiwa laki-laki dan 232.976 jiwa perempuan. Terdapat pertumbuhan penduduk sebesar 1,33 persen per tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk Kabupaten Bireuen sebesar 252 jiwa/km² pada tahun 2023.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2023

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Samalanga	13.457	13.553	27.010
2.	Jeunieb	13.336	13.539	26.875
3.	Peudada	14.648	14.963	39.611
4.	Jeumpa	19.709	19.832	39.541
5.	Peusangan	26.728	28.321	55.049
6.	Makmur	8.000	8.504	16.504
7.	Gandapura	12.139	12.955	25.094
8.	Pandrah	4.676	4.799	9.475
9.	Juli	17.840	18.153	35.993
10.	Jangka	15.124	15.532	30.656
11.	Simpang Mamplam	14.357	14.366	28.723
12.	Peulimbang	6.504	6.659	13.163
13.	Kota Juang	24.055	24.737	48.792
14.	Kuala	9.849	10.227	20.076

15.	Peusangan Siblah Krueng	6.315	6.549	12.864
16.	Peusangan Selatan	7.573	8.006	15.579
17.	Kuta Blang	11.692	12.281	23.973
	Total	226.002	232.976	458.978

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa tingkat kepadatan penduduk di 17 kecamatan bervariasi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Juang, dengan jumlah 2.888 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Pandrah, yang hanya memiliki kepadatan sebesar 81 jiwa/km²

4.1.1 Fenomena Banjir Di Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen memiliki potensi bencana banjir ringan atau rendah karena topografinya yang beragam dan cuma sebagian kecil wilayah pesisir yang berpotensi banjir. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bireuen. Banjir terjadi akibat kombinasi berbagai faktor termasuk curah hujan tinggi, sungai yang dangkal, tanggul yang rusak, dan penggundulan hutan. Meluapnya air ke permukaan daratan berdampak buruk pada lingkungan, sehingga dapat terjadinya kerusakan infrastruktur dan menghambat aktivitas masyarakat.



Gambar 4.2 Kondisi Banjir di Kabupaten Bireuen

Meskipun Upaya mitigasi, banjir bisa terjadi dan menyebabkan kerugian bagi Masyarakat dan infrastruktur.... Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan peningkatan dan melibatkan stakeholder-stakeholder lain dalam mitigasi bencana banjir agar mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir di Kabupaten Bireuen. sehingga masyarakat bisa lebih aman dan kerugian yang ditimbulkan bisa diminimalkan³⁸

³⁸ Hasil Observasi Peneliti

Tabel 4.2
Rekapitulasi Bencana di Kabupaten Bireuen dari Tahun 2021-2023

Tahun	Tanah Longsor	Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung	Kekeringan	Gelombang Pasang	Abrasi
2021	3 Kali	4 Kali	10 Kali	18 Kali	-	-	2 Kali
2022	8 Kali	23 Kali	19 Kali	20 Kali	48 Kali	2 Kali	3 Kali
2023	10 Kali	30 Kali	36 Kali	1 Kali	-	-	-
Jumlah	21	57	69	39	48	2	5

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen

Berdasarkan data bencana BPBD Kabupaten Bireuen tahun 2021-2023, banjir merupakan kejadian yang sering terjadi di Kabupaten Bireuen. Selama tahun 2023, terjadi sebanyak 30 kali banjir yang mengakibatkan 11.016 orang mengungsi dan terdampak. Pada tahun 2022, terjadi sebanyak 23 kali banjir yang mengakibatkan 9.664 orang mengungsi dan 2 orang meninggal dunia. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Bireuen berperan penting dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana, termasuk berbagai upaya yang bertujuan untuk meminimalisir risiko bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur (Mitigasi Struktural) dan peningkatan pengetahuan serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana (Mitigasi Non-Struktural).

4.2. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen

Berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2019 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen, dinyatakan bahwa perangkat daerah ini memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bireuen..

4.2.1 Tugas, Fungsi, dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen

Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab menjalankan fungsi pemerintahan daerah terkait penanganan bencana, sesuai dengan wewenang daerah serta ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menjalankan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kebencanaan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran.

d. koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana.

e. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

f. pembinaan UPTD.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen terdiri dari struktur berikut:

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan kebencanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tanggung jawab untuk mengelola berbagai urusan administratif yang mencakup perencanaan, anggaran, keuangan, urusan umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, pengelolaan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara atau daerah dan kepegawaian dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Menyiapkan dokumen untuk penyusunan program kerja dan rencana kerja, menyusun bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan kebijakan tersebut, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini sebelum terjadinya bencana. Selain itu, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Menyusun bahan untuk pembuatan program kerja dan rencana kerja, menyusun dokumen untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait bidang penyelamatan dan evakuasi korban, perlindungan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan fasilitas dan infrastruktur keagamaan, perlindungan kelompok rentan, pengelolaan pengungsi, serta penyelamatan dan pemulihan infrastruktur penting sesuai dengan tugas yang diberikan. Juga termasuk dalam tugas adalah mengendalikan unit pemadam kebakaran, melakukan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kondisi sosial dan budaya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dalam penanganan pasca bencana, serta melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

4.2.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen

a. Visi

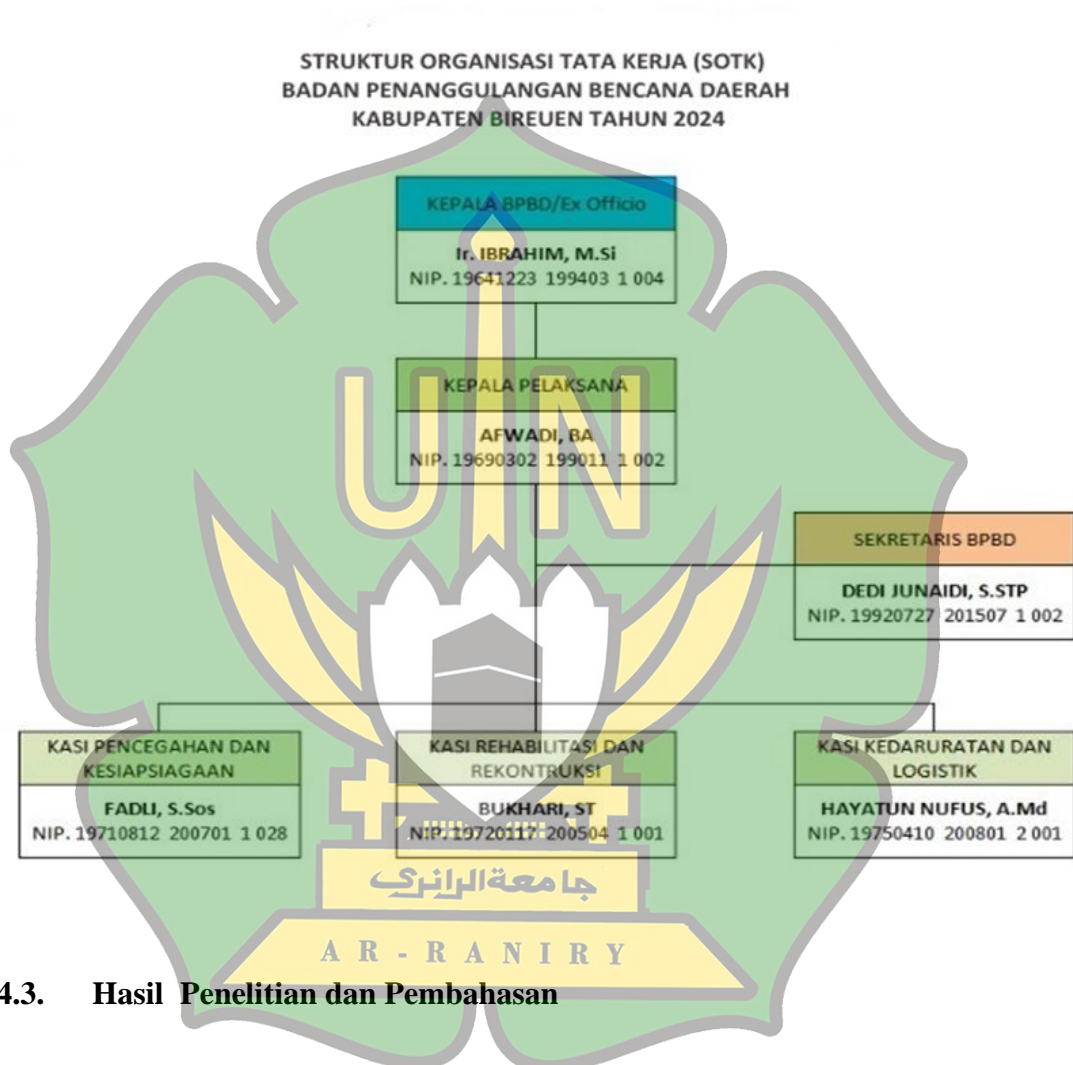
"Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman dan nyaman melalui penanganan bencana yang tanggap, cepat dan tepat".

b. Misi

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas BPBD dan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Meningkatkan koordinasi dalam penanganan bencana dengan instansi terkait.
3. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana.³⁹

³⁹ <https://bpbd.bireuenkab.go.id/>

4.2.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten



4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.4. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, seluruh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tata kelola dalam penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Bireuen memegang peranan penting dalam penanggulangan bencana banjir sebagaimana tertuang dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan

Bencana pada Bab 4 pasal 34 ayat 2 menegaskan pentingnya berbagai kegiatan penanggulangan bencana, seperti penataan ruang, penataan pembangunan, pembangunan infrastruktur, penataan bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik dengan metode konvensional maupun modern.

4.4.1 Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural ialah suatu metode untuk meminimalisir resiko bencana banjir dengan pembangunan infrastruktur fisik serta menerapkan teknologi tertentu.⁴⁰ Mitigasi struktural mengacu pada tindakan yang diambil untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan menggunakan metode rekayasa teknis untuk membangun struktur yang tahan terhadap kejadian tersebut.

Dalam hal ini meliputi Pembangunan infrastruktur untuk mencegah terjadinya banjir seperti Membangun tanggul sungai, Membangun bendungan, Membangun pintu-pintu pengendali air, Pengerukan Sungai sehingga sungai dapat bertahan dan tidak membahayakan penduduknya jika banjir datang. Dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk menghindari terjadinya banjir, diharapkan dapat mengurangi kerugian serta dampak negatif yang timbul akibat bencana tersebut.

Hasil wawancara dengan Fadli, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan disampaikan bahwa:

“Untuk mencegah banjir dalam bentuk Pembangunan infrastruktur kami sudah melakukan hal itu dengan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan

⁴⁰ Shirley Savetlana, dkk., Ilmu-Ilmu Teknik : Kebencanaan 2019, (Lampung : UPT Perpustakaan Universitas Lampung), hal 15-16

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen, akan tetapi untuk Pembangunan fisik atau permanen mereka yang bangun karena itu tugas mereka, kami hanya disaat tanggap darurat. Dan ada beberapa sarana yang sudah dibangun oleh PUPR hasil koordinasi BPBD untuk mengatasi bencana banjir, seperti membuat pintu pengendali air, tanggul, dan beronjong pada daerah yang rawan banjir dan melakukan pembersihan pada saluran irigasi. Sedangkan untuk rambu-rambu peringatan bencana kita juga belum ada”⁴¹

Wawancara dengan Afwadi, BA selaku Kepala Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen disampaikan bahwa:

“Pada mitigasi struktural, BPBD hanya koordinasi dengan PUPR daerah mana yang rawan bencana, kalau untuk Pembangunan infrastruktur itu masuk ke ranah atau wewenang mereka sehingga PUPR berkoordinasi dengan BPBD dalam mitigasi banjir agar pembangunan infrastruktur tercapai tepat sasaran. BPBD dan PUPR kami selalu bekerja sama dalam menangani permasalahan banjir ini, tapi untuk Pembangunan fisik untuk mencegah banjir itu PUPR yang melakukannya”⁴²



Gambar 4.3 Pintu Pengendali Air

Sumber : Dokumentasi Penelitian

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fadli, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tanggal tanggal 5 Juli 2024

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Afwadi, BA selaku Kepala Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen pada tanggal tanggal 5 Juli 2024

Pernyataan dari Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bireuen dan pengamatan lapangan bahwa BPBD Kabupaten Bireuen sudah melakukan upaya mitigasi struktural dengan membangun pintu pengendali air, tanggul, dan beronjong pada daerah yang rawan banjir dan melakukan pembersihan pada saluran irigasi dengan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen untuk meminimalisir dampak atau tindakan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan bencana banjir. Dan menjelaskan BPBD Kabupaten Bireuen hanya selaku koordinasi dalam Pembangunan sarana dan prasarana dalam mengatasi banjir dan untuk Pembangunan PUPR yang melakukannya.

Kemudian wawancara dengan keuchik Gampong Pandrah Janeng yaitu Khairi A. Gani dan Keuchik Gampong Meunasah Tambo yaitu Sulaiman Thaleb yang merupakan gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Pandrah dan Kecamatan Jeunieb, mengatakan bahwa:

“Untuk pembangunan infrastruktur dalam mencegah banjir sudah dibangun beronjong dan pintu pengendali air, dan pemerintah pernah melakukan pembersihan saluran-saluran sungai, tetapi banjir terus terjadi di setiap tahun nya, mungkin salah satu penyebab banjir di tempat kami yaitu penebangan hutan dan sungai yang dangkal. Jadi dampak yang kami rasakan yaitu kami tidak bisa beraktivitas dan banyak sawah-sawah yang gagal tanam”⁴³

⁴³ Hasil Wawancara dengan keuchik Gampong Pandrah Janeng yaitu Khairi A. Gani dan Keuchik Gampong Meunasah Tambo yaitu Sulaiman Thaleb sebagai gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Pandrah dan Kecamatan Jeunieb pada tanggal tanggal 7 Juli 2024



Gambar 4.4 Tanggul Beronjong
Sumber : Dokumentasi Penelitian



Gambar 4.5 Pembersihan Saluran-Saluran Irigasi
Sumber : Instagram Dinas PUPR Kabupaten Bireuen⁴⁴

⁴⁴ DinasPUPR.Bireuen, Pembersihan sampah di pintu saluran irigasi yang ditangani oleh petugas irigasi pandrah, Di akses di https://www.instagram.com/p/CvR9_vJJoeY/?igsh=d3k3N2JhZjFhdDRt (di akses pada tanggal 29 Juli 2023)

Selanjutnya wawancara dengan keuchik Gampong Leubu Mee merupakan gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Makmur yaitu Dahlan Abdullah, mengatakan bahwa:

“Untuk pembangunan infrastruktur untuk mencegah banjir di Gampong Leubu Mee belum ada, sekitaran 10 tahun lalu pemerintah pernah melakukan pengerukan sungai di Gampong yang terdampak banjir, setelah pengerukan sungai banjir terjadi tidak setinggi sekarang, kami sudah mengajukan Pembangunan infrastruktur untuk mencegah banjir pada Musrenbang untuk tahun 2025. Penyebab banjir ditempat kami yaitu dangkal nya sungai biasanya banjir terjadi saat musim hujan bisa terjadi 2 kali bahkan lebih, saat terjadi banjir ketinggian air di desa kami mencapai 1 meter”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Keuchik Gampong Pandrah Janeng dan Meunasah Tambo serta bukti pengamatan di lapangan bahwasanya untuk pembangunan infrastruktur mencegah banjir sudah melakukan upaya mitigasi struktural. Sedangkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Leubu Mee belum dilakukan Pembangunan infrastruktur untuk mencegah terjadinya bencana banjir di desa tersebut. Dalam hal tersebut BPBD Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya melakukan mitigasi struktural.

Adapun Wawancara dengan Masyarakat Gampong Pandrah Janeng yaitu Khamsiah merupakan masyarakat yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

“Gampong kami sering terjadinya banjir dalam setahun bisa 2 sampai 3 kali biasanya di akhir tahun, untuk pembangunan mengurangi banjir sudah dibangun seperti pintu pengendali air dan beronjong, tetapi banjir tahun kemarin pintu pengendali air sudah rusak atau jebol saat terjadi banjir”⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan keuchik Gampong Leubu Mee yaitu Dahlan Abdullah sebagai gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Makmur pada tanggal tanggal 8 Juli 2024

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan masyarakat Gampong Pandrah Janeng yaitu Khamsiah sebagai masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Pandrah pada tanggal tanggal 7 Juli 2024

Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat Gampong Meunasah Tambo yaitu Saifuddin merupakan masyarakat yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

“Untuk Pembangunan yang mengatasi banjir di daerah kami sudah dibangun tanggul oleh pemerintah, tetapi saat musim hujan atau hujan berkepanjangan banjir selalu terjadi, saat terjadi bencana banjir kami tidak bisa bekerja dan Sebagian sawah gagal tanam karena terendam dan terbawa banjir”⁴⁷



Gambar 4.6 Tanggul Saluran Sungai

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen

Berikutnya wawancara dengan Masyarakat Gampong Leubu Mee yaitu Sayuti merupakan masyarakat yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

“Untuk di daerah Leubu Mee, Pembangunan tanggul belum pernah dibangun, Desa kami ketika banjir bisa merendam 3 hari. Ketika musim hujan, banjir langsung meluap ke rumah-rumah kami dan sungai di Krueng Leubu dangkal dan juga sempit. Mereka datang kesini ketika terjadi bencana banjir saja”⁴⁸

Hasil wawancara dengan Masyarakat yang terdampak bencana banjir bahwasanya banjir sangat mengganggu aktivitas mereka. Ada beberapa tempat

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan masyarakat Gampong Meunasah Tambo yaitu Saifuddin sebagai masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Jeunieb pada tanggal tanggal 7 Juli 2024

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan masyarakat Gampong Leubu Mee yaitu Sayuti sebagai masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Makmur pada tanggal tanggal 8 Juli 2024

yang sudah dibangun infrastruktur untuk mencegah banjir akan pembangunan infrastruktur untuk mencegah bencana banjir belum tepat sasaran. Selain itu, masyarakat di daerah rawan banjir mengalami kerugian yang berdampak pada ekonomi masyarakat karena banjir yang menyebabkan gagal tanam.

Adapun hasil wawancara serta bukti pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya BPBD Kabupaten Bireuen dalam melakukan Pembangunan infrastruktur tidak terlalu berperan dikarenakan dalam permasalahan Pembangunan infrastruktur itu ranahnya PUPR Kabupaten Bireuen. Sedangkan BPBD Kabupaten Bireuen hanya selaku koordinasi agar Pembangunan mencegah banjir tepat sasaran. Dalam Pembangunan infrastruktur mencegah banjir belum sepenuhnya tepat sasaran, masih ada tempat yang belum dibangun infrastruktur mitigasi bencana sehingga Masyarakat merasakan dampak sangat besar terhadap bencana banjir tersebut.

Dengan dilakukannya pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah yang rawan banjir, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berperan aktif dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bireuen.

BPBD Bireuen telah berperan dalam melaksanakan mitigasi struktural, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya atau belum menyeluruh dalam menjalankan mitigasi struktural dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana pada Bab IV pasal 34 ayat 2, yaitu pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan

infrastruktur, tata bangunan dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.⁴⁹

Hal tersebut sesuai dengan teori peran menurut Biddle yaitu Peran organisasional adalah menekankan hubungan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhubung dengan interaksi sosial dan fokus khusus pada perencanaan.

4.4.2 Mitigasi Non Struktural

Mitigasi Non Struktural ialah mitigasi dengan upaya pencegahan atau pengurangan risiko bencana yang tidak berkaitan langsung dengan struktur fisik, seperti bangunan atau infrastruktur. Tindakan non-struktural merujuk pada langkah-langkah yang tidak melibatkan pembangunan fisik tetapi menggunakan pengetahuan, praktik, atau kesepakatan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Terutama melalui kebijakan dan peraturan, peningkatan kesadaran publik, pelatihan, sosialisasi, serta kegiatan pendidikan.⁵⁰

Hasil wawancara dengan Fadli, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“Untuk melakukan mitigasi kami membuat sosialisasi tanggap bencana itu sudah kami adakan di beberapa wilayah, untuk wilayah barat kami adakan di Kecamatan Pandrah, sedangkan di wilayah Tengah di Kecamatan Kota Juang dan di wilayah timur di Kecamatan Peusangan”⁵¹

⁴⁹ Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana

⁵⁰ United Nations Office For Disaster Risk Reduction, Tindakan struktural dan non struktural, Di akses dari <https://www.undrr.org/terminology/structural-and-non-structural-measures>

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fadli, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tanggal tanggal 5 Juli 2024

Selanjutnya Wawancara dengan Afwadi, BA selaku Kepala Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen mengungkapkan bahwa:

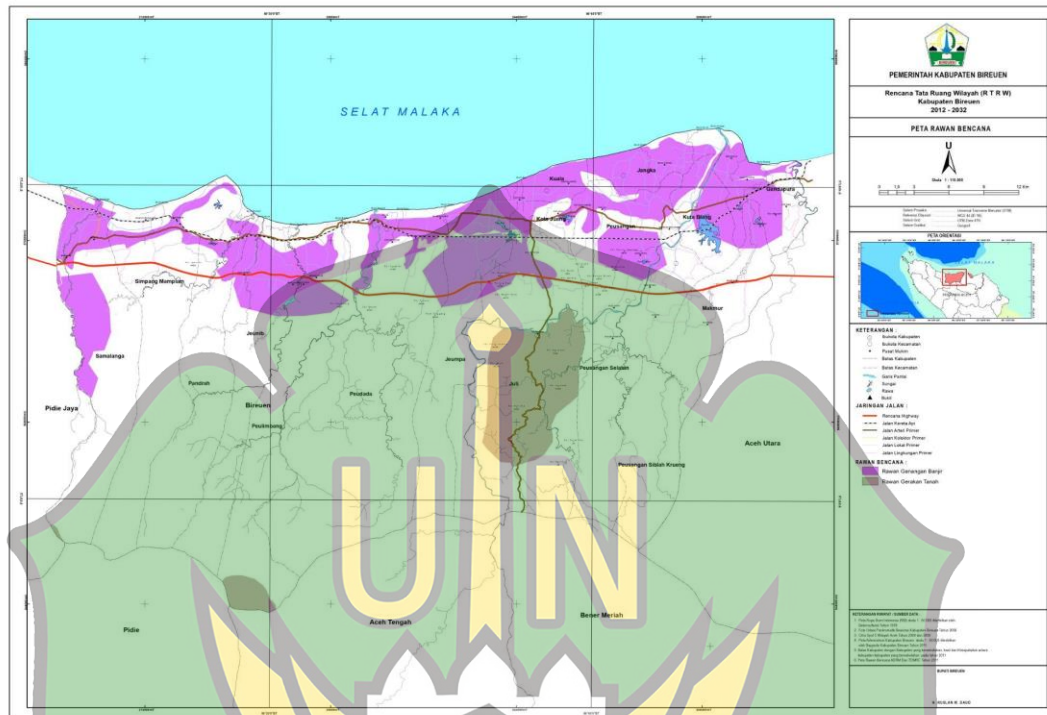
“Dalam mitigasi non struktural kami sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang kesiapan dalam menghadapi bencana dan kami sudah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Daerah Rawan dan melibatkan para Camat seluruh Kabupaten Bireuen, Perwakilan Keuchik di tiap-tiap kecamatan, perwakilan sekolah di Kabupaten Bireuen mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK, dan Organisasi yang berkaitan dengan Kebencanaan antara lain RAPI, PMI, dan Forum PRB Kabupaten Bireuen. hal itu sudah dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Jadi untuk peta rawan bencana sudah kami buat dan sudah kami publikasi web BPBD Kabupaten Bireuen, untuk dalam hal sosialisasi di media sosial kami belum membuat hal itu, dan untuk kebijakan tentang pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan Pembangunan itu belum kami lakukan”⁵²



Gambar 4.7 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Daerah Rawan Bencana

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Afwadi, BA selaku Kepala Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen pada tanggal tanggal 5 Juli 2024



Gambar 4.8 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bireuen
 Sumber : Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bireuen⁵³

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bireuen serta hasil pengamatan di lapangan, BPBD Kabupaten Bireuen telah melaksanakan beberapa langkah dalam mitigasi non-struktural. Langkah-langkah tersebut yaitu sosialisasi tentang meningkatkan kesiapan menghadapi bencana dan BPBD Kabupaten Bireuen telah menyusun peta daerah rawan bencana. Beberapa wilayah di Kabupaten Bireuen memang menunjukkan potensi risiko banjir, dan upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak bencana banjir tersebut, seperti yang dapat dilihat pada gambar

⁵³ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bireuen, Peta Rawan Bencana Kabupaten Bireuen, <http://bappeda.bireuenkab.go.id/Bappeda>

yang tersedia. Namun, terkait dengan penataan ruang dan regulasi pembangunan, BPBD Kabupaten Bireuen belum menetapkan kebijakan atau peraturan khusus mengenai hal ini.

Kemudian wawancara dengan keuchik Gampong Pandrah Janeng yaitu Khairi A. Gani merupakan gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Pandrah mengatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi tentang menghadapi banjir itu sudah dilakukan, sedangkan untuk programnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu menjaga lingkungan dan langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah banjir dan BPBD mengingatkan agar untuk tidak melakukan penebangan pohon”⁵⁴

Wawancara dengan Keuchik Gampong Meunasah Tambo yaitu Sulaiman Thaleb yang merupakan gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Jeunieb, mengatakan bahwa Dalam hal sosialisasi mitigasi kebencanaan sudah dilakukan untuk masyarakat⁵⁵

Berikutnya wawancara dengan Keuchik Gampong Leubu Mee merupakan gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Makmur yaitu Dahlan Abdullah , mengatakan bahwa:

“Untuk kegiatan sosialisasi dalam menghadapi kebencanaan sudah dilakukan, kami mengikuti kegiatan tersebut di Kecamatan Peusangan”⁵⁶

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan keuchik Gampong Pandrah Janeng yaitu Khairi A. Gani sebagai gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Pandrah pada tanggal 7 Juli 2024

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampong Meunasah Tambo yaitu Sulaiman Thaleb sebagai gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Jeunieb pada tanggal 7 Juli 2024

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan keuchik Gampong Leubu Mee yaitu Dahlan Abdullah sebagai gampong yang terdampak banjir di Kecamatan Makmur pada tanggal 8 Juli 2024

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong yang terdampak banjir bahwasanya BPBD Kabupaten Bireuen telah melakukan sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan. BPBD Kabupaten Bireuen membuat sosialisasi di beberapa wilayah-wilayah tertentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Hal tersebut BPBD Kabupaten Bireuen telah menjalankan peran pemerintah dalam penyuluhan sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun hasil wawancara dengan Masyarakat Gampong Pandrah Janeng yaitu Khamsiah dan Masyarakat Gampong Meunasah Tambo yaitu Saifuddin merupakan masyarakat yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

“Iya, saya pernah mengikuti program sosialisasi tentang menghadapi kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, mereka memberikan cara-cara mengurangi resiko dan selalu menjaga alam dan mengingatkan agar untuk tidak melakukan penebangan pohon”⁵⁷

Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat Leubu Mee yaitu Sayuti merupakan masyarakat yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

“Saya dan masyarakat desa lain yang rawan banjir pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait banjir yang dilakukan pemerintah, mereka memberikan cara-cara menanggulangi banjir sebelum, saat, dan setelah banjir”⁵⁸

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan masyarakat Gampong Pandrah Janeng yaitu Khamsiah dan sebagai masyarakat Gampong masyarakat Meunasah Tambo yaitu Saiffudin yang terdampak banjir di Kecamatan Pandrah pada tanggal tanggal 7 Juli 2024

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan masyarakat Gampong Leubu Mee yaitu Sayuti sebagai masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Makmur pada tanggal tanggal 8 Juli 2024



Gambar 4.9 Sosialisasi Mitigasi Bencana

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen

Dari hasil wawancara dengan Masyarakat Gampong yang terdampak banjir setra dan pengamatan lapangan bahwasanya BPBD Kabupaten Bireuen telah melakukan sosialisasi untuk masyarakat yang rawan banjir.

Selanjutnya pernyataan dari para narasumber bahwasanya BPBD Kabupaten Bireuen telah melakukan tata cara penanggulangan bencana banjir seperti, cara menanggulangi banjir sebelum banjir, saat terjadinya banjir, dan setelah banjir, dan mengingatkan agar untuk tidak melakukan penebangan pohon. Dikarenakan Pohon berfungsi untuk menahan air, mencegah erosi tanah, dan sebagai penahan aliran air yang bisa menyebabkan banjir.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan bencana banjir, hal ini memberikan dukungan yang signifikan bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Kesadaran ini penting karena partisipasi

masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya bencana banjir.

Dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Bireuen telah melakukan sosialisasi untuk masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. BPBD Kabupaten Bireuen menjalankan sosialisasi di beberapa wilayah, untuk wilayah barat diadakan di Kecamatan Pandrah, sedangkan di wilayah Tengah di Kecamatan Kota Juang dan di wilayah timur di Kecamatan Peusangan dengan mengundang masyarakat-masyarakat yang rawan terjadinya banjir.

Hal tersebut BPBD Bireuen telah menjalankan Mitigasi Non Struktural atau telah menjalankan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana, Dengan adanya membuat sosialisasi untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana dan membuat peta rawan bencana. Berdasarkan hal tersebut, BPBD Bireuen telah menjalankan teori peran menurut Biddle yaitu Peran organisasional adalah menekankan hubungan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhubung dengan interaksi sosial dan fokus khusus pada perencanaan.

Sedangkan mengenai pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan Pembangunan, BPBD Kabupaten Bireuen belum membuat kebijakan atau peraturan tentang hal tersebut. Dalam hal tersebut BPBD Kabupaten Bireuen belum melaksanakan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana pada Bab IV pasal 34 ayat 2 tentang kegiatan mitigasi yaitu pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan pembangunan.

4.5. Hambatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam Mitigasi Bencana Banjir

Kabupaten Bireuen memiliki 17 kecamatan dan 609 gampong dan termasuk daerah yang rawan banjir. Penyebab bencana banjir di Kabupaten Bireuen tersebut yaitu meluapnya air sungai, jebolnya tanggul penahan dan penebangan pohon secara liar sehingga mengakibatkan penggundulan hutan. Karena wilayah Kabupaten Bireuen yang luas, BPBD Kabupaten Bireuen menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan proses mitigasi bencana banjir di daerah tersebut. Hambatan-hambatan ini mempengaruhi peran BPBD Kabupaten Bireuen dalam menangani dan mencegah dampak banjir di seluruh wilayah kabupaten.

4.5.1 Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural yaitu melibatkan upaya fisik dan teknis untuk mengurangi dampak bencana. Namun, BPBD menghadapi sejumlah hambatan dalam melaksanakan mitigasi struktural.

Wawancara dengan Afwadi, BA selaku Kepala Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa:

“Untuk hambatan kita selama ini yaitu BPBD Kabupaten Bireuen Belum mempunyai dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk dokumen KRB kita lagi penyusunan buat tahun ini, sehingga belum merata dalam melakukan mitigasi bencana”⁵⁹

Hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Bireuen memiliki hambatan dalam mitigasi struktural yaitu BPBD Kabupaten Bireuen belum memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Afwadi, BA selaku Kepala Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen pada tanggal 5 Juli 2024

sehingga membuat BPBD belum menyeluruh dalam melakukan pembangunan infrastruktur untuk mencegah banjir. Akibatnya, tidak ada keseimbangan dalam melakukan mitigasi bencana banjir. Hal tersebut membuat BPBD Kabupaten Bireuen memiliki hambatan dalam melakukan mitigasi struktural.

4.5.2 Mitigasi Non Struktural

Mitigasi Non Struktural merupakan mitigasi dengan upaya pencegahan atau pengurangan risiko bencana dengan langkah-langkah yang tidak melibatkan pembangunan fisik tetapi menggunakan pengetahuan, praktik, atau kesepakatan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Namun terdapat hambatan-hambatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam melakukan mitigasi non struktural.

Hasil wawancara dengan Fadli, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyatakan bahwa:

“Hambatan kita dalam mitigasi banjir salah satunya Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya bencana banjir, masih banyak penebangan pohon secara liar yang mengakibatkan penggundulan hutan dan anggaran yang terbatas dalam membuat sosialisasi mitigasi bencana sehingga kami harus membuat sosialisasi per wilayah-wilayah”⁶⁰

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Bireuen adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bencana dan anggaran yang terbatas dalam membuat sosialisasi mitigasi bencana sehingga BPBD Kabupaten Bireuen harus membuat sosialisasi di wilayah-wilayah tertentu.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Fadli, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tanggal tanggal 5 Juli 2024

Tanpa adanya kesadaran masyarakat terhadap bencana, upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi penebangan pohon secara liar, yang pada akhirnya meningkatkan risiko bencana banjir.

Selanjutnya Wawancara dengan Afwadi, BA selaku Kepala Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa:

“Untuk hambatan mitigasi non struktural yaitu Anggaran yang terbatas dalam membuat sosialisasi. Selain itu, kita masih kekurangan sumber daya manusia (SDM), dan BPBD masih bertipe C.”⁶¹

Dari hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana bahwa hambatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam mitigasi non struktural yaitu anggaran yang terbatas sehingga terganggu program-program dalam mitigasi bencana dan BPBD Kabupaten Bireuen masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan BPBD Kabupaten Bireuen masih bertipe C.

Dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Bireuen memiliki faktor penghambat dalam menjalankan mitigasi non struktural. Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap bencana, penggundulan hutan dan anggaran yang terbatas dalam melakukan sosialisasi menjadi hambatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam melakukan mitigasi non struktural.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Afwadi, BA selaku Kepala Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen pada tanggal tanggal 5 Juli 2024

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dalam Mitigasi Bencana Banjir" ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dalam upaya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural telah berjalan dengan baik, BPBD Kabupaten Bireuen berperan sebagai peran organisasional dalam mitigasi struktural dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bireuen dalam melakukan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana banjir dan BPBD hanya selaku koordinasi agar pembangunan infrastruktur tepat sasaran dan untuk pembangunan infrastruktur Dinas PUPR yang melakukannya. Sedangkan mitigasi non struktural, BPBD Kabupaten Bireuen berperan sebagai peran organisasional dalam mitigasi non struktural dengan membuat kegiatan sosialisasi untuk masyarakat yang terdampak banjir dan membuat peta rawan bencana banjir.
2. Faktor penghambat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dalam mitigasi struktural yaitu tidak adanya dokumen

Kajian Risiko Bencana (KRB) sehingga sehingga belum merata dalam melakukan mitigasi bencana. Sedangkan hambatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam mitigasi non struktural yaitu kesadaran masyarakat masih kurang terhadap bencana, penggundulan hutan, Sumber daya manusia (SDM) masih kurang dan anggaran yang terbatas dalam melakukan sosialisasi menjadi hambatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam melakukan mitigasi non struktural.

5.2.1 Saran

Berlandaskan pada kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti bermaksud menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen diharapkan agar secepatnya menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) agar pembangunan infrastruktur untuk mencegah banjir merata ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen diharapkan agar membuat kebijakan atau peraturan tentang penataan ruang dan pengaturan pembangunan di wilayah-wilayah yang terdampak banjir guna meminimalisir bencana banjir.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dihipkan untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait guna mengatasi masalah penebangan pohon liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Masyarakat diharapkan agar terus menjaga alam dan tidak melakukan penebangan pohon secara liar guna meminimalkan dampak bencana banjir.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku :

- Bakornas PB, 2007, Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia Edisi II.
- Bevaola, Kumusari, 2014, Manajemen Bencana dan Kapasitas Pemerintah Lokal, (Yogyakarta : Gaya Media), hal.22-23
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Makassar: syakir Media Press, 2001), hal. 30
- M. Chazienal Ulum, 2014, Manajemen Bencana Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif, (Malang : UB Press). Hal.56
- Nurjanah, dkk., Manajemen Bencana , (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 40
- Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 215
- Shirley Savetlana, dkk., Ilmu-Ilmu Teknik : Kebencanaan 2019, (Lampung : UPT Perpustakaan Universitas Lampung), hal 15-16
- Soekanto Soerjono, 2013. Sosial suatu pengantar, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Hal.212
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007). Hal. 333-345

Daftar Rujukan Jurnal :

Andri Purwa Nugraha, Herdian Kertayasa, “Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta” Tahun 2022, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No.1

Dewi Arum Pertiwi, “*Geologi Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Daerah Bahaya Banjir Dengan Metode Ahp Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur*” Tahun 2021, Jurnal Teknik Geologi Vol. 4 No. 1, hal. 7-17

Heny Suhindarno, “*Strategi Bpbd Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro*”, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Volume 5 No 2

Irfan Laabu, Skripsi: “Peran pemerintah Daerah Dalam memasarkan pariwisata bahari Di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah”. Hal. 9-10

Lili somantri, “*Pemanfaatan Teknik Penginderaan Jauh Untuk Mengidentifikasi Kerentanan Risiko Banjir*”, Tahun 2008, Jurnal gea Vol 8 No 2

Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani, “Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)” Tahun 2022, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No.1

Noviana Hoar Dacosta, 2022, “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka*”, Skripsi

Nurul Sahira, 2023, *“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)*

Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Utara”, Skripsi

Pujianti, Gerry Katon Mahendra, *“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

(BPBD) Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana Banjir di

Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta”, Jurnal

Politik dan Governance, Vol.5 No.2,

Sri Muliana Mardikaningsih dkk, *“Studi Kerentanan Dan Arah Mitigasi*

Bencana Banjir Di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen” Tahun 2016,

Jurnal GeoEco Vol. 3, No. 2 Hal.157-163

Wanda Syahputra, 2022, *“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam*

Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat”.

Tesis

Daftar Rujukan Internet :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bireuen, Peta

Potensi Bencana Banjir Kabupaten Bireuen

<http://bappeda.bireuenkab.go.id/Bappeda>

Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Statistik Bencana di Indonesia

<https://dibi.bnpb.go.id/>

Deshinta Ariesta, 4 Gampong Terendam Banjir di Kabupaten Bireuen

<https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/4-gampong-terendam->

[banjir-di-kabupaten-bireuen](https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/4-gampong-terendam-banjir-di-kabupaten-bireuen)

Dinas Sosial Aceh, Aceh Rawan Bencana, Tagana Diharapkan Terampil

Mengurangi Risiko Bencana

<https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/aceh-rawan-bencana-tagana-diharapkan-terampil-mengurangi-risiko-bencana>

Ensiklopedia Penanggulangan Bencana Indonesia, Mitigasi Bencana yang Efektif

https://bencanapedia.id/Mitigasi_Bencana

Haslinda Juwita, Tahun 2023 Aceh Dilanda 418 Bencana dengan Kerugian Rp 430 Miliar

<https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/tahun-2023-aceh-dilanda-418-bencana-dengan-kerugian-rp-430-miliar>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Nandy, *“Materi Mitigasi Bencana: Pengertian, Jenis, Strategi, Tahapan dan Contohnya”*

<https://www.gramedia.com/literasi/mitigasi-bencana/>

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, 10 Februari 2016, Mengetahui Jenis Jenis Banjir Dan Cara Menanggulangnya

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/>

Rusnadi Suyatman Putra, Banjir di Kabupaten Bireun, Sebanyak 3.458 Rumah Terendam dan 1.199 Jiwa Mengungsi

<https://www.bnpb.go.id/berita/banjir-di-kabupaten-bireun-sebanyak-3458-rumah-terendam-dan-1199-jiwa-mengungsi>

Safrina, Di 2022, Sebanyak 469 Peristiwa Bencana Terjadi di Aceh

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/di-2022-sebanyak-469-peristiwa-bencana-terjadi-di-aceh>

Daftar Rujukan Regulasi / Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.


Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman Pembentukan BPBD.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana



Lampiran 1 SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 157/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PE/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 01 Desember 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Siti Nur Zahkha, M.Si. Sebagai pembimbing I

2. Hijrah Saputra, S.Pd, M.Si. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Faziul Atwadi

NIM : 200802007


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Dalam Mitigasi Bencana Banjir

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 15 Januari 2024
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,


MUJI MULIA

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1040/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAZLUL AUWAL / 200802007**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Desa Lancok Ulim Kcc. Pandrah Kab. Bireuen

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juni 2024

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 17 Desember
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

1 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD):

1. Apakah benar, Kabupaten Bireuen sering terjadinya banjir di setiap tahunnya?
2. Apa penyebab sering terjadinya banjir di Kabupaten Bireuen?
3. Apakah sudah ada upaya BPBD Kabupaten Bireuen dalam mitigasi bencana banjir?
4. Apa saja bentuk mitigasi struktural yang telah dilakukan oleh BPBD untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Bireuen?
5. Bagaimana bentuk konkrit/rinci proyek infrastruktur yang telah dibangun untuk mengatasi banjir?
6. Bagaimana BPBD Kabupaten Bireuen mengidentifikasi area yang rawan banjir?
7. Bagaimana BPBD Kabupaten Bireuen membangun infrastruktur dengan tepat sasaran?
8. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mitigasi struktural?
9. Bagaimana cara BPBD Kabupaten Bireuen melakukan mitigasi non struktural untuk mencegah bencana banjir?
10. Apa saja bentuk-bentuk mitigasi non struktural yang dilakukan untuk mencegah bencana banjir?

11. Apakah BPBD Kabupaten Bireuen telah membuat peta rawan bencana banjir?
12. Apakah BPBD Kabupaten Bireuen telah melakukan sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang mitigasi banjir? Jika sudah bagaimana bentuk kegiatannya?
13. Bagaimana BPBD Kabupaten Bireuen berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir dan pentingnya mitigasi banjir?
14. Apakah BPBD Kabupaten Bireuen telah melakukan sosialisasi tentang mitigasi banjir melalui media sosial?
15. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mitigasi non struktural?

2. Keuchik Gampong

1. Seberapa sering banjir terjadi di desa ini dan apa dampaknya terhadap masyarakat?
2. Apa saja infrastruktur yang sudah dibangun di desa ini untuk mengurangi risiko banjir?
3. Bagaimana proses koordinasi antara desa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dalam pembangunan infrastruktur mitigasi banjir?
4. Apa saja program atau kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir?

5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi banjir non-struktural?
6. Apa hambatan yang dihadapi BPBD Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir?

3. Masyarakat

1. Seberapa sering banjir terjadi di daerah ini dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan Anda sehari-hari?
2. Apa yang Anda ketahui tentang infrastruktur yang sudah dibangun untuk mengurangi risiko banjir?
3. Apakah Anda merasa ada kebutuhan untuk infrastruktur tambahan atau perbaikan infrastruktur yang ada?
4. Apakah Anda pernah mengikuti program atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap banjir?
5. Bagaimana peran BPBD Kabupaten Bireuen dalam menyediakan informasi dan sosialisasi terkait mitigasi banjir?

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara





جامعة البراري





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Fazlul Auwal
Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 21 September 2002
Nomor Handphone : 082311997228
Alamat : Desa Lancok Ulim Kec.Pandrah Kab.Bireuen
E-Mail : Fazlul21auwal@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Jeunieb
Sekolah Menengah Pertama : MTsN Jeunieb
Sekolah Menengah Kejuruan : SMA 9 Banda Aceh

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : Baik | 2024 | Ma'had Al-Jami'ah UIN Ar-Raniry
TOEFL : 403 | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : A- | 2020 | FISIP | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : Sangat Baik | 2023 | BPBA